



JOGJA KITA

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menggandeng 23 Lembaga Bantuan Hukum/ Organisasi Bantuan Hukum (LBH/OBH) untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Program ini didukung anggaran Rp 276 juta guna menangani perkara litigasi maupun nonlitigasi sepanjang 2026.



Pemkot Beri Bantuan Hukum Warga Miskin Gratis pada 2026

Gandeng 23 LBH Tangani Perkara Litigasi dan Nonlitigasi

PENJABAT (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Dedi Budiono mengatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil. Termasuk masyarakat miskin yang selama ini terhambat masalah ekonomi. Dedi ingin, lewat kerja sama antara pemkot dengan 23 LBH itu bisa

memberi kesempatan masyarakat miskin mengakses layanan hukum. Baik itu secara litigasi atau kasus hukum lewat pengadilan formal. Maupun nonlitigasi atau kasus hukum di luar pengadilan seperti mediasi dan negosiasi.

"Pemkot Jogja menyediakan total anggaran sebesar Rp 276 juta untuk mendanai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin," ujar Dedi usai penandatanganan kerja sama dengan 23 LBH di Ruang Yudhistira Balai Kota Jogja, Jumat (23/1).

Kepala Bagian Hukum Pemkot Jogja Rihari Wulandari menyampaikan, bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat diakses oleh warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Skemanya dengan datang langsung ke Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Jogja atau mendatangi kantor LBH yang bermitra dengan pemkot. Meliputi LBH Al-Kautsar, LBH Dharmayudha, LBH Harapan, LBH Sekawan, YLBH Sembada, LBH Senopati, YLBH Sikap, YLPA DIY, LKBH FH UI, YLBH Handayani, LKBH Universitas Janabadra.

Lalu OBH Sekar Melati, PBHI Yogyakarta, PKBH FH UAD, PKBH FH UMY, LBH Yogyakarta, LBH Tentrem, YLBH Apik, YPBH Peradi Bantul, RBH Yayasan Afta, LKBH Bangkit, LKBH Pandawa dan LSBH Sejati.

"Pemkot bermitra dengan LBH/OBH yang sudah terakreditasi Kementerian Hukum," tegas Rihari. Sementara itu, Direktur YLBH Sembada Hendrikus Indhayana Yudha memastikan komitmennya membantu masyarakat miskin di

Kota Jogja untuk mengakses bantuan hukum. Baik itu secara litigasi maupun nonlitigasi. "Kami bangga bisa terus melayani masyarakat," tegas Hendrikus. (inu/wia/fj)



SAH: Penjabat Sekda Kota Jogja Dedi Budiono usai melakukan perjanjian kerja sama dengan 23 LBH dalam program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, Jumat (23/1).



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretaris Daerah	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005